



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR :**

**RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA KERJA
KECAMATAN KAPUR IX
TAHUN 2026**

Muaro Paiti, September 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Di dalam peraturan tersebut, Kecamatan Kapur IX sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2026 ini menyusun perubahan rencana tahunan Perangkat Daerah dalam bentuk Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026.

Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, yakni penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Demikian Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Diharapkan dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah ini akan memudahkan pimpinan dan pelaksana di Kecamatan Kapur IX dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2026 sekaligus menjadi pedoman serta bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, baik makro-strategis maupun mikro/teknis-operasional dalam konteks pembangunan daerah di Kecamatan Kapur IX.

Muaro Paiti , September 2026

CAMAT KAPUR IX

AIDIL FITRI B, S.Ag, MM

Pembina/IV.a

NIP 19740715 200801 1 018

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Landasan Hukum	I-7
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
	1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026	II-1
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II 2026	II-1
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-19
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-23
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-24
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	III-1
	3.1 Perubahan Rencana Kerja	III-1
	3.2 Perubahan Pendanaan	III-9
BAB IV	PENUTUP	IV-1
	4.1 Catatan Penting	IV-1
	4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	IV-1
	4.3 Rencana Tindak Lanjut	IV-2

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1.1	Kalender Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026	I-6
Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026	II-2
Tabel 2.2	Klasifikasi Penilaian Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	II-20
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	II-21
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026	II-24
Tabel 3.1	Review Analisis Kebutuhan pada perubahan Renja Perangkat Daerah	III-2
Tabel 3.2	Rencana Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2026	III-10
Tabel 3.3	Rekapitulasi Kebutuhan Pendaan	III-18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam konsep administrasi maupun manajemen, perencanaan (*planning*) merupakan fungsi organik yang mutlak dijalankan oleh organisasi dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan pada dasarnya perencanaan adalah suatu proses pengambilan keputusan secara rasional untuk tindakan masa datang yang tepat berdasarkan pilihan atau alternatif yang ada dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, perencanaan juga merupakan tindakan manajerial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan organisasi, serta memberi jawaban atas pertanyaan tentang: (1) tindakan apa yang harus dikerjakan (*what*); (2) apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan (*why*); (3) dimana tindakan tersebut dilakukan (*where*); (4) kapan tindakan tersebut dilakukan (*when*); (5) siapa yang akan melakukan tindakan tersebut (*who*) dan; (6) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut (*how*).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, bertahap, dan berkesinambungan dalam bentuk transformasi ekonomi, sosial, dan budaya menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan nilai dan norma tertentu, serta satuan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan tugas mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan.

Adapun perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses mempersiapkan dengan sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara rasional atas dasar skala prioritas atau kebutuhan dan dengan memperhatikan berbagai alternatif pilihan terbaik yang ada serta faktor keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Disisi lain, secara normatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan disusun dengan 2 pendekatan utama, yaitu: (a) pendekatan proses, yang terdiri dari pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *up* dan

top down; dan (b) pendekatan substansi, yang terdiri dari Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana tahunan (untuk periode 1 tahun) yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, di dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana Perangkat Daerah, yang terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renstra Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu, Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam konteks tersebut, Kecamatan Kapur IX sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2026 ini menyusun rencana tahunan Perangkat Daerah berupa Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026. Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2026-2029 dan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, yakni penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah.

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seluruh Camat, termasuk Camat Kapur IX menyelenggarakan tugas, meliputi:

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati tersebut, Camat Kapur IX mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkada;
4. Pengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

5. Pengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan;
6. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan nagari;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Selanjutnya, sebagai bagian dari dinamika perubahan dokumen perencanaan tahunan daerah, utamanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, maka Perangkat Daerah Kecamatan Kapur IX menindaklanjutinya dengan menyusun Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026. Berdasarkan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Sementara itu, di dalam Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dokumen Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 serta Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.15.3/142/APKD/BPKAD-2026 Tentang Percepatan Penyusunan dan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2026, maka Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2026 sampai dengan triwulan I serta melakukan identifikasi terhadap rencana efisiensi dan realokasi belanja atas anggaran pendapatan dan belanja daerah yang nantinya akan dialokasikan kepada program-program yang mendukung visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah sinergis dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026.

Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah yang dimuat dalam Perubahan RKPD juga berfungsi untuk memastikan isu pembangunan yang

menjadi prioritas nasional mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2026 ini, agar target dan tujuan nasional yang ingin dicapai dapat terealisasi, antara lain:

- a. Penguatan Sumber Daya Manusia, pendidikan, dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian Inflasi Daerah;
- e. Peningkatan Pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan Swasembada Pangan; dan Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja Tim penyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah;
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dalam rangka harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga tercipta kesesuaian program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang direncanakan. Selain itu, Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah juga mempedomani hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan sepenuhnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.
Rancangan awal Perubahan Renja Perangkat Daerah tersebut kemudian disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal Perubahan RKPD. Selain itu, apabila terdapat rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru, maka diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Perubahan RKPD menjadi rancangan Perubahan RKPD. Verifikasi sebagaimana dimaksud harus dapat menjamin bahwa rancangan Perubahan Renja

Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal Perubahan RKPD. Apabila berdasarkan hasil verifikasi ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Selanjutnya, berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan tersebut kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan itu disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perumusan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Perubahan RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang Perubahan RKPD.

Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diverifikasi. Verifikasi harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah lainnya. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud apabila ditemukan hal yang perlu disempurnakan, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah akan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah. Berdasarkan saran dan rekomendasi tersebut kepala Perangkat Daerah menyempurnakan kembali rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan kemudian disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

5. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 memiliki makna strategis sebagai salah satu bentuk sinkronisasi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan sehingga diharapkan prioritas sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan diarahkan pada pencapaian target akhir Renstra. Hal ini perlu dilakukan agar tujuan dan sasaran pembangunan yang dirumuskan dapat lebih terarah, terpadu dan saling mendukung, yang pada gilirannya seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Adapun jadwal penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 disajikan pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1

KALENDER TAHAPAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH																
NO	TAHAPAN/URAIAN KEGIATAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER	KETERANGAN	
		MINGGU				MINGGU				MINGGU				MINGGU		
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I		
I	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja															
	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja															
II	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja															
	Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja															
III	Penetapan Perubahan Renja															
1	Penetapan Perubahan Renja															

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2026-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2026-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 41 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2029 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 42);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 26 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai salah satu dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan maksud di atas, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan pelaksana pada Kecamatan Kapur IX dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2026;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Kecamatan; serta
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Kecamatan Kapur IX pada tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maksud, tujuan, landasan penyusunan dan sistematika penulisan Perubahan Renja tersebut.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

Berisi evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dan capaian Renstra Kecamatan Kapur IX, analisis kinerja pelayanan Kecamatan Kapur IX, isu-isu strategis atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi indikator kinerja dan perubahan rencana kerja dan pagu indikatif program dan kegiatan Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 dan Perkiraan Maju tahun 2027

BAB IV PENUTUP

Berisi ketentuan penutup, mengurai tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result/outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan serta menyajikan realisasi atau capaian dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan sebelumnya. Selain itu, hasil evaluasi dimaksud juga ditujukan sebagai kajian (*review*) terhadap pencapaian rencana strategis Perangkat Daerah, sehingga akselerasi, tindakan perbaikan, dan langkah penyempurnaan dapat dirumuskan untuk dilaksanakan pada periode selanjutnya. *Review* hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kapur IX tersebut mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kecamatan Kapur IX sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.1

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota

Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Periode Pelaksanaan: TRIWULAN II 2026

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada sasaran RKPD: Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik di Kecamatan

No	Sasaran	Program/Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2030 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-2)		Target kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2026 (Tahun n-1) yang dievaluasi		Relasisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2026		Unit SKPD Penanggung Jawab
		Kode Rekening	Uraian								I		II		III		IV								
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12		13=6+12		14=13/5x100		15
					K	Rp	K	Rp	K	Awal (RP)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		7	UNSUR KEWILAYAHAN			13.983.158.985		1.858.503.257		2.304.172.031		452.895.853		460.247.984						913.143.837		2.771.647.094			
		701	KECAMATAN			13.983.158.985		1.858.503.257		2.304.172.031	7	-	452.895.853		460.247.984					913.143.837		2.771.647.094			

1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	70011	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah	80%	11.368.658.985	70%	1.812.328.257	80%	2.268.565.031	70%	448.679.853	70%	448.667.984					14,46%	897.347.837	80,98%	2.709.676.094	101,23	23,83	Kecamatan Kapur IX
		70021	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	100.000.000	80%	4.574.000	100%	4.093.000	40%	-	0%	1.240.000					42,86%	1.240.000	88,57%	5.814.000	88,57	5,81	Kecamatan Kapur IX
		7002011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	32.000.000	200	2.057.000	200	1.274.000	0	-	0	489.000					0	489.000	200	2.546.000	20,00	7,96	Kecamatan Kapur IX
		7002012	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	400	10.000.000	100	-	0	-	100	-	0	-					100	-	200	-	50,00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7002013	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	400	10.000.000	100	-	0	-	0	-	0	-					0	-	100	-	25,00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7002014	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	500	12.000.000	100	740.000	100	999.000	100	-	0	751.000					100	751.000	200	1.491.000	40,00	12,43	Kecamatan Kapur IX
		7002015	Koordinasi dan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	500	11.000.000	100	1.037.000	100	870.000	100	-	0	-					100	-	200	1.037.000	40,00	9,43	Kecamatan Kapur IX

				SKPD																				
		70020 11.00 00 16	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5La pa po ra n	11.000 .000	1La pa po ra n	740.000	1Lap ora n	950.0 00	0Lap ora n	-	0Lap ora n	-				0Lapo ran	-	1Lapor an	740.000	20, 00	6,73	Kecamatan Kapur IX
		70020 11.00 00 17	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	4La pa po ra n	14.000 .000	1La pa po ra n	-																
		70020 11.00 00 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	1% 00	8.243. 399.98 5	8% 00	1.689.775. 305	1% 00	2.153 .608. 032	1% 905	426.665.66 3	1% 905	430.584. 498				38, 10%	857.2 50.16 1	87,6 2%	2.547.025 .466	87, 62	30,90	Kecamatan Kapur IX
		70020 11.00 00 21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	8Or ang/ Bul an g/ Bu l an	8.205. 899.98 5	1Or ang/ Bul an g/ Bu l an	1.689.775. 305	1Or ang/ Bul an	2.151 .958. 032	1Or ang/ Bul an	426.665.66 3	1Or ang/ Bul an	430.584. 498				17Oran g/Bu lan	857.2 50.16 1	33,0 0Orang /Bula n	2.547.025. 466	38, 82	31,04	Kecamatan Kapur IX
		70020 11.00 00 23	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifika si Keuangan SKPD	5Do k u m en	4.500. 000	1Do k u m en	-	0Dok um en	-	0Dok um en	-	0Dok um en	-				0Doku men	-	1Doku men	-	20, 00	0,00	Kecamatan Kapur IX

		7 1	0 1	0 0	2 0	0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 0	D o k u m e n	11.000 .000	1 0	D o k u m e n	-	1 0	Dok um en	550.0 00	0 0	Dok um en	-	0 0	Dok um en	-						0 0	Doku men	-	1 0	Doku men	-	20, 00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 1	0 0	2 0	0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	9 0	L a p o r a n	16.000 .000	1 8	L a p o r a n	-	1 0	Lap ora n	1.100 .000	4 0	Lap ora n	-	4 0	Lap ora n	-						8 0	Lapo ran	-	26 0	Lapor an	-	28, 89	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 1	0 0	2 0	0 0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 0	D o k u m e n	6.000. 000	1 0	D o k u m e n	-	0 0	Dok um en	-	0 0	Dok um en	-	0 0	Dok um en	-						0 0	Doku men	-	1 0	Doku men	-	20, 00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 1	0 0	2 0	0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	1 0 0	%	31.000 .000	8 0	%	-	1 0 0	%	860.0 00	0 0	%	-	0 0	%	-						0 0	%	-	80 %	-	80, 00	0,00	Kecamatan Kapur IX	
		7 1	0 1	0 0	2 0	0 0	Penyusunan Perencanaan Kebuuhan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 0	D o k u m e n	10.000 .000	1 0	D o k u m e n	-																							
		7 1	0 1	0 0	2 0	0 0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKD	8 0	L a p o r a n	6.000. 000	1 0	L a p o r a n	-																							
		7 1	0 1	0 0	2 0	0 0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 0	L a p o r a	15.000 .000	1 0	L a p o r a	-	1 0	Lap ora n	860.0 00	0 0	Lap ora n	-	0 0	Lap ora n	-						0 0	Lapo ran	-	1 0	Lapor an	-	20, 00	0,00	Kecamatan Kapur IX

					n		n																	
		70021105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100%	209.672.000	80%	520.000	100%	704.000	0%	-	0%	300.000				0%	300.000	80%	820.000	80,00	0,39	Kecamatan Kapur IX
		700211052	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1Paket	34.000.000	0Paket	-	0Paket	-	0Paket	-	0Paket	-				0Paket	-	0Paket	-	0,00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		700211053	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5Dokumen	4.500.000	1Dokumen	520.000	1Dokumen	704.000	0Dokumen	-	0Dokumen	300.000				0Dokumen	300.000	1Dokumen	820.000	20,00	18,22	Kecamatan Kapur IX
		700211055	Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	4Dokumen	3.500.000	0Dokumen	-																
		700211050	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	1028orang	72.672.000	0orang	-																
		700211051	bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis peraturan perundang-undangan	1028orang	95.000.000	0orang	-																
		70021106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100%	396.500.000	80%	40.842.575	100%	41.479.431	0%	8.193.000	40%	7.024.000				40%	15.217.000	88%	56.059.575	88,00	14,14	Kecamatan Kapur IX
		700211061	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	4Paket	4.000.000	1Paket	1.091.000	1Paket	636.000	0Paket	-	0Paket	-				0Paket	-	1Paket	1.091.000	25,00	27,28	Kecamatan Kapur IX

				Kantor	Disediakan																				
		710020 11.00 62		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5Paket	78.000.000	1Paket	8.356.875	1Paket	5.805.400	0Paket	2.163.000	1Paket	904.000				1Paket	3.067.000	2Paket	11.423.875	40,00	14,65	Kecamatan Kapur IX
		710020 11.00 63		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4Paket	28.000.000	0Paket	-	0Paket	-	0Paket	-	0Paket	-				0Paket	-	0Paket	-	0,00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		710020 11.00 65		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5Paket	23.000.000	1Paket	2.725.200	1Paket	2.988.031	0Paket	650.000	1Paket	180.000				1Paket	830.000	2Paket	3.555.200	40,00	15,46	Kecamatan Kapur IX
		710020 11.00 68		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5Laporan	7.500.000	1Laporan	382.000	1Laporan	450.000	0Laporan	-	0Laporan	-				0Laporan	-	1Laporan	382.000	20,00	5,09	Kecamatan Kapur IX
		710020 11.00 69		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5Laporan	256.000.000	1Laporan	28.287.500	1Laporan	31.600.000	0Laporan	5.380.000	0Laporan	5.940.000				0Laporan	11.320.000	1Laporan	39.607.500	20,00	15,47	Kecamatan Kapur IX
		710020 11.00 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100%	1.336.265.000	20%	-	0%	-	0%	-	0%	-				0%	-	20%	-	20,00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		710020 11.00 72		Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	1Unit	530.000.000	0Unit	-	0Unit	-	0Unit	-	0Unit	-				0Unit	-	0Unit	-	0,00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		710020 11.00 75		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1Unit	150.000.000	0Unit	-	0Unit	-	0Unit	-	0Unit	-				0Unit	-	0Unit	-	0,00	0,00	Kecamatan Kapur IX

		7 1	0 1	0 .0 0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 8 i t	U n i t	430.00 0.000	0 U n i t	- 0 Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	-				0 Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	- 0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX						
		7 1	0 1	0 .0 0 9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 n i t	U n i t	226.26 5.000	0 U n i t	- 0 Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	-				0 Unit	- 0 Unit	- 0 Unit	- 0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX						
		7 1	0 1	0 .0 0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	1 0 0	%	217.30 0.000	8 0	%	31.170.52 7	1 0 0	%	22.38 0.568	0 %	4.160.590	0 %	4.489.38 6	0 %	80 %	39.820.50 3	80, 00	18,33	Kecamatan Kapur IX					
		7 1	0 1	0 .0 0 8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 L a p o r a n	L a p o r a n	70.500 .000	1 L a p o r a n	5.586.743	1 Lap ora n	10.24 0.000	0 Lap ora n	1.160.590	0 Lap ora n	1.489.38 6	0 Lapo ran	2.649. 976	1 Lapor an	8.236.719	20, 00	11,68	Kecamatan Kapur IX						
		7 1	0 1	0 .0 0 8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 L a p o r a n	L a p o r a n	146.80 0.000	1 L a p o r a n	25.583.784	1 Lap ora n	12.14 0.568	0 Lap ora n	3.000.000	0 Lap ora n	3.000.00 0	0 Lapo ran	6.000. 000	1 Lapor an	31.583.78 4	20, 00	21,51	Kecamatan Kapur IX						
		7 1	0 1	0 .0 0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	1 0 0	%	834.52 2.000	7 5 , 5 6	%	45.445.85 0	8 0	%	45.44 0.000	0 , 0 0	%	9.660.600	5 , 5 6	%	5.030.10 0	5,5 6	%	14.69 0.700	76,6 7	%	60.136.55 0	76, 67	7,21	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 1	0 .0 0 9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4 0 i t	U n i t	292.40 0.000	8 U n i t	43.196.850	7 Unit	40.65 0.000	0 Unit	9.360.600	1 Unit	4.730.10 0	1 Unit	14.09 0.700	9 Unit	57.287.55 0	22, 50	19,59	Kecamatan Kapur IX						
		7 1	0 1	0 .0 0 9	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 0 i t	U n i t	65.000 .000	7 U n i t	2.249.000	6 Unit	4.790 .000	0 Unit	300.000	0 Unit	300.000	0 Unit	600.0 00	7 Unit	2.849.000	17, 50	4,38	Kecamatan Kapur IX						

		7 1	0 1	0 0	2 0	0 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 i t	Un i t	425.12 2.000	0 i t	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX		
		7 1	0 1	0 0	2 0	0 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 i t	Un i t	52.000 .000	0 i t	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX		
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Unsur Pelayanan Publik	7 1	0 2	0 0	2 0	0 0	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	8 0	%	550.00 0.000	6 4	%	13.370.00 0	8 0	%	1.692 .000	0 %	-	0 %	-	64 %	13.370.00 0	80, 00	2,43	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 2	0 0	2 0	0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	8 0	%	13.000 .000	7 6	%	1.000.000	8 0	%	842.0 00	0 %	-	0 %	-	76 %	1.000.000	95, 00	7,69	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 2	0 0	2 0	0 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5 p o r a n	L a p o r a n	9.000 000	1 p o r a n	1.000.000	1 Lap o r a n	0 Lap o r a n	842.0 00	0 Lap o r a n	-	0 Lap o r a n	-	1 Lap o r a n	1.000.000	20, 00	11,11	Kecamatan Kapur IX	
		7 1	0 2	0 0	2 0	0 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	4 p o r a n	L a p o r a n	4.000 000	0 p o r a n	-	0 Lap o r a n	-	0 Lap o r a n	0 Lap o r a n	-	0 Lap o r a n	-	0 Lap o r a n	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX	
		7 1	0 2	0 0	2 0	2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah	8 0	%	27.000 .000	7 6	%	12.370.00 0	8 0	%	850.0 00	0 %	-	0 %	-	76 %	12.370.00 0	95, 00	45,81	Kecamatan Kapur IX

				Kecamatan	yang ada di kecamatan																								
		7 1	0 2	0 .	2 0 0 1 2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 L a p o r a n	27.000 .000	1 L a p o r a n	12.370.000	1 Lap ora n	850.0 00	0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- .				0 Lapo ran	- .	1 Lapor an	12.370.00 0	20, 00	45,81	Kecamatan Kapur IX			
		7 1	0 2	0 .	2 0 3	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase teraksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	8 0	%	510.00 0.000	-																		
		7 1	0 2	0 .	2 0 0 3 1	Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum yang di sediakan	4 D o k u m e n	510.00 0.000	0 D o k u m e n																			
3.	Meningkatnya Aktivitas Pemberdayaa n Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	7 1	0 3	0 .	0 0 1	PROGRAM PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari di Tingkat Kecamatan	8 0	%	989.00 0.000	6 4	%	2.805.000	8 0	%	5.415 .000	0 %	2.216.000	0 %	1.580.00 0	0,0 %	3.796. 000	64 %	6.601.000	80, 00	0,67	Kecamatan Kapur IX		
		7 1	0 3	0 .	2 0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif	8 0	%	107.00 0.000	7 6	%	2.805.000	8 0	%	5.415 .000	7 0	%	2.216.000	7 0	%	1.580.00 0	140 %	3.796. 000	104 %	6.601.000	130 ,00	6,17	Kecamatan Kapur IX

		70020 13.00 11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	35 Lembaga masyarakat Kemas sya ra ka ta n	37.000 .000	7 Lembaga masyarakat Kemas sya ra ka ta n	1.805.000	7 Lembaga Kemas tan	2.750 .000	7 Lembaga Kemas yar aka tan	2.216.000	0 Lembaga Kemas yar aka tan	-					7 Lembaga Kemas yara kata n	2.216. 000	14 Lembaga Kemas syara katan	4.021.000	40, 00	10,87	Kecamatan Kapur IX
		70020 13.00 13	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51 Laporan o r a n	70.000 .000	1 Laporan o r a n	1.000.000	1 Laporan	2.665 .000	0 Laporan	-	0 Laporan	1.580.00 0					0 Laporan	1.580. 000	1 Laporan	2.580.000	20, 00	3,69	Kecamatan Kapur IX
		7002 13.00 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	80 %	400.00 0.000		-																	
		70020 13.00 31	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	28 Lembaga a g a Kemas sya ra ka ta n	200.00 0.000	0 Lembaga a g a Kemas sya ra ka ta n																		

						n		n																
		7	0	0	2	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang di sediakan	2	U	8	n	200.00	0	U	n	i	t						
		7	0	0	2	0	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di tingkat kecamatan yang efektif					482.00											
		7	0	0	2	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	1	K	2	e	220.00	0	K	e	l	u	a	r	a			
		7	0	0	2	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	3	K	0	e	20.000	0	K	e	l	u	a	r	a			
		7	0	0	2	0	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup	3	K	0	e	20.000	0	K	e	l	u	a	r	a			

						Bersih dan Sehat																			
		7 1	0 3	0 0	2 0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	1 2 0	K e l u a r g a	222.00 0.000	0	K e l u a r g a													
4		7 1	0 4	0 0	2 0	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	8 0	%	6.500. 000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 4	0 0	2 0	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase terlaksananya koordinasi dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan yang efektif	8 0	%	3.500. 000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 4	0 0	2 0	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	L a p o r a n	3.500. 000	0	L a p o r a n	-	0	Lap ora n	-	0	Lap ora n	-	0	Lapo ran	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 4	0 0	2 0	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase terlaksananya koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di tingkat kecamatan	8 0	%	3.000. 000	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0	%	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX

		7 1	0 4	0 0	2 0	0 0	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3	L a p o r a n	3.000. 000	0	L a p o r a n	-	0	Lap ora n	-	0	Lap ora n	-										0	Lapo ran	-	0	Lapor an	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 5	0	2 0	0 1	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	8 0	%	178.00 0.000		27.000.00 0	8 0	%	27.00 0.000	0 %	2.000.000	0 %	10.000.0 00										0 %	12.00 0.000	0 %	39.000.00 0	0,0 0	21,91	Kecamatan Kapur IX		
		7 1	0 5	0 0	2 0	0 1	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan	8 0	%	178.00 0.000		27.000.00 0	8 0	%	27.00 0.000	0 %	2.000.000	0 %	10.000.0 00										0 %	12.00 0.000	0 %	39.000.00 0	0,0 0	21,91	Kecamatan Kapur IX		
		7 1	0 5	0 0	2 0	0 0	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 5 0 0	O r a n g	30.000 .000	0	O r a n g	-	0	Ora ng	-	0	Ora ng	-									0	Oran g	-	0	Orang	-	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX	

		7 1	0 5	0 0	2 0	0 0	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 D o k u m e n	148.00 0.000	1 D o k u m e n	27.000.000	1 Dok um en	27.00 0.000	0 Dok um en	2.000.000	0 Dok um en	10.000.0 00					0 Doku men	12.00 0.000	1 Doku men	39.000.00 0	20, 00	26,35	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 6	0 0			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Nagari	8 0 %	891.00 0.000		3.000.000	8 0 %	1.500 .000	0 %	-	0 %	-					0 %	-	0 %	3.000.000	0,0 0	0,34	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 6	0 0	2 0	0 1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif	8 0 %	891.00 0.000		3.000.000	8 0 %	1.500 .000	0 %	-	0 %	-					0 %	-	0 %	3.000.000	0,0 0	0,34	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 6	0 0	2 0	0 0	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5 D o k u m e n	9.000. 000	1 D o k u m e n	-	1 Dok um en	-	0 Dok um en	-	0 Dok um en	-					0 Doku men	-	1 Doku men	-	20, 00	0,00	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 6	0 0	2 0	0 0	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5 D o k u m e n	13.000 .000	1 D o k u m e n	1.000.000	1 Dok um en	750.0 00	0 Dok um en	-	0 Dok um en	-					0 Doku men	-	1 Doku men	1.000.000	20, 00	7,69	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 6	0 0	2 0	0 0	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5 D o k u m e n	13.000 .000	1 D o k u m e n	2.000.000	1 Dok um en	750.0 00	0 Dok um en	-	0 Dok um en	-					0 Doku men	-	1 Doku men	2.000.000	20, 00	15,38	Kecamatan Kapur IX
		7 1	0 6	0 0	2 0	0 0	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	4 L a p o r a	206.50 0.000	0 D o k u m e																		

					Undangan	n		n																	
		7 0 0 2 0 1 6 . 0 0 0 1 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 D o k u m e n	4.000.000	0 D o k u m e n	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX			
		7 0 0 2 0 1 6 . 0 0 0 1 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 D o k u m e n	212.50 0.000	0 D o k u m e n																		
		7 0 0 2 0 1 6 . 0 0 1 1 0	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	4 D o k u m e n	212.50 0.000	0 D o k u m e n	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX			
		7 0 0 2 0 1 6 . 0 0 1 1 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	4 D o k u m e n	214.50 0.000	0 D o k u m e n	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	- 0 Dok um en	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX			
		7 0 0 2 0 1 6 . 0 0 1 1 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 L a p o r a n	6.000.000	0 L a p o r a n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	- 0 Lap ora n	0,0 0	0,00	Kecamatan Kapur IX				
						13.983 .158.9 85		1.858.503. 257		2.304 .172. 031	7		452.895.85 3	7		460.247. 984	- - - - -	913.1 43.83 7	2.771.647 .094		19,82				
Rata-rata capaian kinerja (%) Program									1,77		1,85				3,61										
Predikat Kinerja									Sangat Rendah		Sangat Rendah				Sangat Rendah										

Rata-rata capaian kinerja (%) Kegiatan	12,21		12,46						24,68		
Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah						Sangat Rendah		
Rata-rata capaian kinerja (%) Sub Kegiatan	#REF!		#REF!						#REF!		
Predikat Kinerja	Sangat Rendah		Sangat Rendah						Sangat Rendah		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja: 1. Komitmen pimpinan dan staf dalam pencapaian target kinerja individu maupun organisasi 2. Budaya dan lingkungan kerja yang kondusif 3. Koordinasi yang efektif											
Faktor penghambat pencapaian kinerja: 1. Kuantitas dan kualitas SDM/Aparatur yang masih belum memadai 2. Keterbatasan prasarana dan sarana yang dimiliki 3. Penggunaan dan penguasaan teknologi yang masih lemah, utamanya komunikasi dan informasi											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:											
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah berikutnya:											

Secara umum dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas tidak terdapat permasalahan yang berarti. Evaluasi terhadap pencapaian target dan realisasi sampai dengan triwulan II Tahun 2026 dapat di jelaskan sebagai berikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp.2.268.565.031,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 897.347.837,- (39,56%).

Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.4.093.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.240.000,- (30,30%).
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.2.153.608.032,- dengan realisasi sebesar Rp.857.250.161,- (39,81%).
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.860.000,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- (0%).
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.704.000,- dengan realisasi sebesar Rp.300.000,- (41,61%).
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.41.479.431,- dengan realisasi sebesar Rp.15.217.000,- (36,69%).
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.22.380.568,- dengan realisasi sebesar Rp.8.649.976,- (38,65%).
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.45.440.000,- dengan realisasi sebesar Rp.14.690.700,- (32,33%).

- II. Program Penyelenggaraan Pemeritahan dan Pelayanan Publik dengan anggaran Rp.1.1692.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%).

- III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan anggaran Rp.5.415.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.796.000,- (70,10%).

Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah :

1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.5.415.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.796.000,- (70,10%).

- IV. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran Rp.27.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.000.000,- (44,44%).

Kegiatan yang terdapat dalam program ini adalah :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Jumlah dana yang dianggarkan sebesar Rp.27.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.000.000,- (44,44%).

- V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp.1.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 0,- (0%).

Adapun faktor pendorong keberhasilan kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan di Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan staf dalam pencapaian target kinerja individu maupun organisasi;
2. Budaya dan lingkungan kerja yang kondusif serta produktif; dan
3. Koordinasi yang efektif antar stakeholder.

Sementara itu, faktor penghambat keberhasilan kinerja program dan kegiatan/sub kegiatan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan kualitas SDM/Aparatur yang masih belum memadai;
2. Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kualitas target kinerja;
3. Keterbatasan prasarana dan sarana yang dimiliki; dan
4. Penggunaan dan penguasaan teknologi yang belum efektif, utamanya komunikasi dan informasi.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan yang telah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja yang ditetapkan, dan target serta realisasi capaian kinerja Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2026. Dalam laporan tersebut, hal utama yang menjadi perhatian adalah pengukuran kinerja, yaitu proses yang dilakukan untuk menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) dari program maupun kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Indikator keluaran (*output*) dan/atau hasil (*outcome*) tersebut diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) minimal meliputi dimensi keluaran (*output*) dan dimensi hasil (*outcome*).

Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan. Sementara itu, hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja.

Pada Tahun 2026, Kecamatan Kapur IX telah melaksanakan berbagai program, kegiatan/sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Penilaian capaian kinerja menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
 Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Atas Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi daerah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing Perangkat Daerah, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Adapun Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung oleh sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan dapat terlihat.

Sebagai gambaran, berikut disajikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2025 berdasarkan kaidah pengukuran capaian target kinerja sebagaimana telah dijelaskan di atas yang dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini:

Tabel 2.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Kapur IX
Tahun 2025

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU KD	IKU PD (Kecamatan Kapur IX)	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				√	√	55	60	65	68	55,35	N/A	72,20	72,30	- Target 2025 berdasarkan Perubahan Renja 2025 -Target 2026 dan 2027 berdasarkan Renstra 2025-2029
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				√	√	90	90,5	91	91,5	91,52	N/A	92	92	
3	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari				√	√	50	53	55	68	50	N/A	70	75	
4	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan				√	√	-	-	53	55	-	-	60	65	

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	IKU KD	IKU PD (Kecamatan Kapur IX)	IKK (IKD dalam RPJMD)	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
							Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan				√	√	50	53	55	58	55	N/A	75	80	
6	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari				√	√	50	53	55	58	50	N/A	80	85	

Secara umum, diinformasikan bahwa capaian target indikator sasaran strategis dan IKU Kecamatan Kapur IX Tahun 2025 telah sesuai harapan. Meskipun demikian, terdapat 1 target kinerja yang belum terpenuhi secara maksimal, yaitu Indikator Kinerja Utama dan Sasaran Strategis I, yakni Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan target 75 dan realisasi target 70,22. Hal ini mengindikasikan bahwa Kecamatan Kapur IX masih memerlukan perbaikan dalam aspek akuntabilitas kinerja dengan penyusunan dokumen laporan kinerja yang lebih berkualitas. Perbaikan tersebut sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menciptakan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan terselenggaranya pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX yang disusun dan akan dilaksanakan pada Tahun 2026 ini tidak terlepas dari analisis strategis lingkungan yang berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kapur IX, yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah. Permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah. Hal ini dapat dilihat dari:
 1. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia aparatur;
 2. Dukungan anggaran yang belum memadai;
 3. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat desa/nagari;
- c. Belum optimalnya pelayanan publik.

Hambatan dan persoalan di atas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kecamatan Kapur IX. Kecamatan Kapur IX merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi ke 4 (empat) yaitu meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas serta sasarannya adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Permasalahan dan isu penting penyelenggaraan tupoksi dan IKU.

Diantara tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kinerja pelayanan Kecamatan Kapur IX yaitu :

- a. Lokasi geografis yang berbukit, luas wilayah dan jumlah sebaran penduduk menjadi tantangan tersendiri dalam pemberian pelayanan yang efektif dan efisien di Kecamatan Kapur IX.
- b. Sarana dan prasarana pendukung yang tersedia belum memenuhi standar pelayanan minimal sehingga diperlukan pengadaan dan perbaikan fasilitas.
- c. Kuantitas dan kualitas SDM pelaksana pelayanan yang kurang memadai dan diperlukan penambahan personil.
- d. Kecendrungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- e. Kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan kualitas.

Adapaun peluang yang dimiliki dalam mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Kapur IX adalah sebagai berikut :

- a. RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2045 dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029 dengan agenda pembangunan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan.
- b. Adanya komitmen dari kepala daerah dalam pemberdayaan masyarakat serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah serta pelayanan publik.
- c. Keterkaitan institusional pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan.
- d. Kehidupan sosial budaya dan keagamaan serta adanya dukungan dan partisipasi masyarakat luas.
- e. Pelaksanaan diklat peningkatan kualitas aparatur.

Adapun *strategic issues* yang kemudian mengemuka dari permasalahan tersebut diatas adalah:

- 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
- 2. Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
- 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Kapur IX pada Tahun 2026 sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan yang dirumuskan melalui musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Kecamatan Kapur IX tidak memperoleh usulan secara langsung melalui musrenbang baik mulai Musrenbang Nagari maupun Kecamatan. Sehubungan dengan keadaan di atas, sehingga tabel yang ditampilkan kosong.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
OPD: Kecamatan Kapur IX

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	N	I	H	I	L

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Perubahan Rencana Kerja

Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 tersusun dalam program yang merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi Pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun program dan kegiatan dalam perencanaan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX adalah sebagai berikut :

1. Mengutamakan pelayanan publik sebagai dasar terciptanya Indeks Pelayanan/IndeksKepuasan Masyarakat dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi;
 - a. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - b. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - c. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan (AKIP) .
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat menuju Lima Puluh Kota yang madani Madani Beradat dan Berdudaya.
 - a. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - b. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari

Review terhadap Rancangan Perubahan Renja sangat diperlukan karena salah satu tujuan dilakukannya adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Perubahan RKPD, karena pada hakikatnya Perubahan Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan pada umumnya serta target program OPD pada khususnya dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Perubahan RKPD. Pada akhirnya, Perubahan Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi Perubahan RKPD dengan Peraturan Bupati.

Adapun Review terhadap Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX disajikan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel II.6
Review Terhadap Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR KEWILAYAHAN				2.304.172.031	UNSUR KEWILAYAHAN				1.939.415.312	
	KECAMATAN				2.304.172.031	KECAMATAN				1.939.415.312	
1	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah	80 %	2.268.565.031	PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah	80 %	1.856.808.312	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	4.093.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	4.123.000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.274.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.304.000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	999.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	999.000	

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	870.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	870.000	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	950.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	950.000	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	2.153.608.032	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	1.738.851.313	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bln	2.151.958.032	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/Bln	1.737.201.313	
1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	550.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	550.000	
1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	1 Laporan	1.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Blnan/	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan	1 Laporan	1.100.000	

			Penyusunan Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Blnan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	860.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	860.000	
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	860.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	860.000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	704.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	100 %	704.000	
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	704.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	704.000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	41.479.431	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	100 %	42.669.431	
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	636.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	636.000	
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.805.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.805.400	

1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.988.031	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.988.031	
1.5.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	450.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	450.000	
1.5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	31.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	32.790.000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100 %	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	- %	6.732.000	
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- Unit	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	6.732.000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100 %	22.380.568	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	100 %	18.380.568	
1.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.240.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	6.240.000	
1.7.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.140.568	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	12.140.568	
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat	80 %	45.440.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	80 %	44.488.000	

			Daerah					pemerintah daerah pada Perangkat Daerah			
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	40.650.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	41.728.000	
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	4.790.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.760.000	
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	80 %	1.692.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	80 %	1.692.000	
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	80 %	842.000	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	80 %	842.000	
2.1.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	842.000	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	842.000	

2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	80 %	850.000	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya penyelenggaraa n urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	80 %	850.000	
2.2.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	850.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	850.000	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari di Tingkat Kecamatan	80 %	5.415.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari di Tingkat Kecamatan	80 %	55.415.000	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif	80 %	5.415.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif	80 %	55.415.000	
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyar akatan	2.750.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 Lembaga Kemasyarak atan	2.750.000	
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	2.665.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	52.665.000	

4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	80 %	27.000.000	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum di Tingkat Kecamatan	80 %	24.000.000	
4.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan	80 %	27.000.000	Penyelenggaraa n Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase terselenggaranya a urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan	80 %	24.000.000	
4.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	27.000.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	24.000.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Nagari	80 %	1.500.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa/Nagari	80 %	1.500.000	
5.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif	80 %	1.500.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif	80 %	1.500.000	
5.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	-	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1 Dokumen	-	
5.1.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan	1 Dokumen	750.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka	1 Dokumen	750.000	

			Desa			Desa		Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
5.1.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	750.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Kapur IX, Kab. Lima Puluh Kota	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dokumen	750.000	

3.2 Perubahan Pendanaan

Perubahan pendanaan Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Kecamatan Kapur IX Tahun 2026-2029 dan Perubahan RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini:

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH

KECAMATAN KAPUR IX KAB. LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2026

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOM POK SASARA N	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Ber kurang	LOKA SI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKA TIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHA N 2026				NASIO NAL	DAER AH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	7.01.7.01.0.00.6 3.0000	KECAMATAN KAPUR IX							2.088.857.7 30,00	2.304.172.0 31,00	1.887.754.2 25,00	- 201.103.505,0 0							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN							2.088.857.7 30,00	2.304.172.0 31,00	1.887.754.2 25,00	- 201.103.505,0 0							0,00	
	7.01	KECAMATAN							2.088.857.7 30,00	2.304.172.0 31,00	1.887.754.2 25,00	- 201.103.505,0 0							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah				80 %	80 %	2.002.857.7 30,00	2.268.565.0 31,00	1.802.147.2 25,00	- 200.710.505,0 0							0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu				100 %	100 %	1.785.983.73 0,00	2.153.608.03 2,00	1.687.190.22 6,00	-98.793.504,00							0,00	

	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	1.781.983.730,00	2.151.958.032,00	1.685.540.226,00	-96.443.504,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA PENDAPATAN BAGI HASIL DANA BAGI HASIL (DBH) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	0 Dokumen	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	550.000,00	550.000,00	-450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu				100 %	100 %	1.000.000,00	860.000,00	860.000,00	-140.000,00							0,00	

	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	860.000,00	860.000,00	-140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu				100 %	100 %	1.000.000,00	704.000,00	704.000,00	-296.000,00							0,00	
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	704.000,00	704.000,00	-296.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah				100 %	100 %	63.500.000,00	41.479.431,00	41.479.431,00	-22.020.569,00							0,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	1.000.000,00	636.000,00	636.000,00	-364.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	5.805.400,00	5.805.400,00	-4.194.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	1 Paket	3.000.000,00	2.988.031,00	2.988.031,00	-11.969,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX

													Kel/D esa	(DAU)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	26.800.000,00	12.140.568,00	12.140.568,00	-14.659.432,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah				80 %	80 %	77.074.000,00	45.440.000,00	45.440.000,00	-31.634.000,00							0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	52.800.000,00	40.650.000,00	40.650.000,00	-12.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	6 Unit	12.000.000,00	4.790.000,00	4.790.000,00	-7.210.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0 Unit	12.274.000,00	0,00	0,00	-12.274.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-			7.000.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	-2.907.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan				100 %	100 %	7.000.000,00	4.093.000,00	4.093.000,00	-2.907.000,00							0,00	

			tepat waktu																	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	3.000.000,00	1.274.000,00	1.274.000,00	-1.726.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	999.000,00	999.000,00	-1.001.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	870.000,00	870.000,00	-130.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	950.000,00	950.000,00	-50.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai AKIP Nilai IKM				80 %	60 nilai 91 nilai	22.000.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00	-20.308.000,00							0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif				80 %	80 %	2.000.000,00	842.000,00	842.000,00	-1.158.000,00							0,00	

	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	842.000,00	842.000,00	-1.158.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan				80 %	80 %	20.000.000,00	850.000,00	850.000,00	-19.150.000,00							0,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	850.000,00	850.000,00	-19.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari				-	60 %	28.000.000,00	5.415.000,00	55.415.000,00	27.415.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/ nagari di tingkat kecamatan yang efektif				-	80 %	28.000.000,00	5.415.000,00	55.415.000,00	27.415.000,00							0,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	8.000.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	-5.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	2.665.000,00	52.665.000,00	32.665.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA BAGI HASIL (DBH) DANA	-	-			0,00	KECAMATAN KAPUR IX

													esa	ALOKASI UMUM (DAU)						
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan				80 %	53 %	28.000.000, 00	27.000.000, 00	27.000.000, 00	-1.000.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan				80 %	80 %	28.000.000,0 0	27.000.000,0 0	27.000.000,0 0	-1.000.000,00							0,00	
	7.01.05.2.01.000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	28.000.000,0 0	27.000.000,0 0	27.000.000,0 0	-1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPA TAN ASLI DAERAH (PAD) DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMAT AN KAPUR IX
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari				80 %	53 %	8.000.000,0 0	1.500.000,0 0	1.500.000,0 0	-6.500.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif				80 %	80 %	8.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-6.500.000,00							0,00	
	7.01.06.2.01.000 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa</i>				1 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMAT AN KAPUR IX

	7.01.06.2.01.000 2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-2.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPA TAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMAT AN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	<i>Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	-2.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semu a Kel/D esa	PENDAPA TAN BAGI HASIL DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			0,00	KECAMAT AN KAPUR IX
	J U M L A H								2.088.857.7 30,00	2.304.172.0 31,00	1.887.754.2 25,00	- 201.103.505,0 0						0,00		

Berdasarkan dari tabel perubahan Rencana Kerja diatas, maka rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan Kecamatan Kapur IX tahun 2026 dapat disajikan seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Rekapitulasi Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program dan Kegiatan
Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Bidang Urusan	Renja 2026			Total Pagu (Rp)	Perubahan Renja 2026			Total Pagu Indikatif (Rp)
		Jumlah				Jumlah			
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kecamatan	5	16	29	2.304.172.031	5	16	29	1.939.415.312

BAB IV

PENUTUP

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX (Renja Kecamatan Kapur IX) disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Kecamatan Kapur IX sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 yang mengacu pada RPJMD tahun 2025-2029. Selain itu, acuan utama dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 adalah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kapur IX tahun 2025-2029.

Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX memuat hal-hal yang terkait dengan hasil pengendalian pelaksanaan renja Kecamatan Kapur IX sampai dengan triwulan II tahun 2026, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan disertai dengan perubahan rencana kerja dan pendanaan Kecamatan Kapur IX pada tahun 2026.

Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX bertujuan untuk memperoleh pencapaian hasil yang optimal pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan, baik dalam kerangka regulasi maupun keterpaduan dan sinkronisasi antarkegiatan, antarkegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram dalam internal Kecamatan Kapur IX dan antar perangkat daerah dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Kecamatan Kapur IX dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut, baik dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja ini bertujuan untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029, yang di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target Kecamatan Kapur IX serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kecamatan Kapur IX secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 sesuai tugas dan fungsinya.
2. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni Renstra dan Renja serta perubahannya.
3. Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Kapur IX Tahun Anggaran 2026.
4. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 yang dilaksanakan secara triwulanan.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 yang telah ditetapkan selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Kecamatan Kapur IX Tahun 2026 untuk kemudian dituangkan ke dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026, dan diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Demikian Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Kapur IX dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2026.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

S A F N I